Perkembangan Demokratisasi dalam Sistem Politik Demokrasi

di Indonesia

Oleh : Pratiwi Tedjo

NIDN : 00 070558 01

Abstract

*Indonesian political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and excution of policy for a society. The state is a society which is integrated by possesing a coercive authority legally supreme over any indiviual or group which is part of the society.*

*A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of live to which both individuals and associations must confirm is defined by a coercive authority binding upon them all. A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principle of political aquality and under conditions of political freedom.*

*A form of government where the citizens exercise the same right (the right to make political decision) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections.*

*Indonesian political democracy it means political power of the state is equality shared by the citizens. Citizens have the real power to legislate, which perform by delegating this function to their elected representative.*

*Democracy is a form of governmental in which the common people hold political power and can rule either directly or through elected representatives. An example of democracy at work is in the government by the people especially rule of the majority but democracy consolidation is the process by which a new democracy matures, in a way that means it is unlikely to revert to authoritarianism without an external shock.*

*Democratization is the transition to a more democratic political changes moving in a democratic direction and one of the most important concept and trends in modern political science one whose significance is just beginning.*

*By political participation we mean activity by private citizen designed to influence government decision making participation may be individual or collective organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmenal polity power and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views.*

**Keywords** : Democratization, democracy polity and system democracy.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas dan diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.

Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hendaknya mengacu pada akar budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan kepentingan umum. Namun budaya individualisme dan budaya liberal yang masuk melanda masyarakat dengan melalui arus globalisasi tidak dapat dibendung karena kemajuan teknologi.

Sistem politik demokratis adalah sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok pada lembaga pemerintahan, baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam hak dan kemampuan masing-masing untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Konsep Dasar dan Pengertian Demokrasi

Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau sebagai definisi populistik tentang demokrasi yakni sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat maka pengertian demokrasi tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tetapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan.

Adapun demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi kelompok mayoritas dan minoritas.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi dalam kerangka diatas berarti proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaan) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi merupakan proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Negara atas pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahnya yang demokratis dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu :

1. Masaah pembentukan negara
2. Dasar kekuasaan negara
3. Susunan kekuasaan negara
4. Masalah kontrol rakyat
5. Prinsip Demokrasi di Indonesia

Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi ketiga kekuatan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga lembaga negara negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dibawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai dengan hukum dan peraturan. Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu sebagai berikut :

1. Kedaulatan ditangan rakyat
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi)
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Pengambilan keputusan atas musyawarah
6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik
7. Pemilu yang demokratis

Adapun ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo dalam Mirian Budiarjo (1996) dalam bukunya “Introduction in Democratic Theory” memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai, yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
6. Menjamin tegaknya keadilan

Beberapa ciri pokok demokrasi menurut Syahrial Sarb (2006) antara lain :

1. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat dan kehendak rakyat
2. Kebebasan individu dibatas oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan
3. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat
4. Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedaulatan penting dalam sistem kekuasaan negara

Mengutip pendapatnya Zamroni dalam Winarno (2007) bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi : 1) Toleransi, 2) kebebasan mengemukakan pendapat, 3) menghormati perbedaan pendapat, 4) menghormati keanekaragaman dalam masyarakat, 5) terbuka dan komunikasi, 6) menjujung nilai dan martabat kemanusiaan, 7) percaya diri, 8) tidak menggantungkan pada orang lain, 9) saling menghargai, 10) mampu mengekang, 11) kebersamaan, 12) keseimbangan

Demokrasi dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian yang jelas dimana rakyat terlibat langsung merumuskan substansinya mengujicobakan desainnya, menilai dan menguji keabsahannya. Demokrasi mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah dasar untuk suprastruktur dan infrastruktur sistem kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki dan menggunakan kekuasaan dengan paksa. Dalam negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan konsep yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus mempunyai legitimasi hukum. Esensi dari demokrasi dengan rule of law adalah bahwa kekuasaan negara harus mengandung melndungi serta mengembangkan kebenaran hukum. Esensi lainnya bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, memiliki akses sama kepada layanan hukum, sebaliknya seluruh warga negara berkewajiban menaati semua peraturan hukum.

Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal kewajiban dan tanggung jawab ataupun kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula sekedar soal otonomi daerah dan keadilan hukum sebab demokrasi ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran / kesejahteraan (welfare state) oleh, dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

Demokrasi menggariskan keadilan sosial diantaranya berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial lebih merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain.

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang dijiwai dan diinteraksikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia, tidak perlu “identik” sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

1. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusional. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah; (3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

1. Perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gelaja ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Disamping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu : presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, *Basic Human Right*menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selai itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif (Sunarso, dkk., 2008).

1. Perkembagan demokrasi dalam pemerintahan orde baru

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan orde baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila (orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara orde baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom dan sementara masyarakat semakin terealisasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untu mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non migas dan pajak domestik, maupun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode orde lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim orde baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain : Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemiliham umum. Keempat, pelaksanaan hak warga negara (Rukiyati, dkk., 2008).

1. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

Sejak runtuhnya orde baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijkan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era orde baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khusunya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era orde baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

1. Konsolidasi Demokrasi dan Demokratisasi

Demokratisasi diartikan sebagai transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis. Demokratisasi dapat dilihat melalui beberapa pendekatan ilmiah, mulai dari pendekatan struktural, pendekatan elite, pendekatan berhavioral, hingga pendekatan sistem.

Sedangkan demokrasi diartikan cara sederhana pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh dari sistem politik otoriter ke semi demokrasi atau dari sistem politik semi otoriter ke demokrasi.

Konsolidasi demokrasi diartikan sebagai pembiasaan (*habituation*) dimana norma-norma prosedur-prosedur dan harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokan diri dengan aturan yang tertulis dengan tidak tertulis, bahkan ketika berkonflik dan bersaing.

Menurut Diamond (2013) ada 3 (tiga) tugas konsolidasi demokrasi, sebagai berikut :

1. Penguatan demokrasi yaitu membuat struktur-struktur formal demokrasi menjadi lebih liberal, memiliki akuntabilitas, representative, dan terjangkau
2. Pelembagaan politik, yaitu pemerkuatan struktur demokrasi perwakilan dan pemerintahan formal
3. Membangun kinerja rezim yaitu membangun legitimasi politik yang luas melalui formulasi dan impelemntasi kebijakan-kebijakan publik dan kebijakan-kebijakan politik yang positif (sistem pemilu, supremasi hukum, dan lain-lain).

Robert Dahl dalam On Democracy, menjelaskan bahwa proses menuju sistem politik yang demokratis membutuhkan kondisi-kondisi sosial awal yang memadai guna terwujudnya demokratisasi.

Sistem politik yang demokratis pada hakekatnya memerlukan tiga prinsip dasar sebagai institusional demokrasi seperti :

1. Tegaknya etika dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam horizon berbangsa dan bernegara.
2. Tegaknya prinsip konstitusionalisme secara tegas melalui pelaksanaan terhadap supremasi hukum dalam masyarakat
3. Diberlakukan dan dilaksanakannya mekanisme akuntabilitas publik

Dan jalannya demokrasi diperlukan tahapan-tahapan penting sampai pada kondisi yang akan dicapai, adapun berbagai tahapan-tahapan ini adalah :

1. Berjalan sebelum keruntuhan rezim otoriter
2. Terjadinya liberalisasi politik awal
3. Demokratisasi yang dikenal dengan istiliah transisi
4. Proses menuju negara yang demokratis adalah konsolidasi demokrasi

Akan tetapi tidak semua proses / tahapan tersebut bisa selalu berhasil dengan baik dikarenakan ada beberapa negara yang berhasil melewati masa pratransisi dengan baik, namun kemudian gagal setelah memasuki tahap liberalisasi politik awal. Ada pula negara-negara yang berhasil dalam tahap liberalisasi politik awal, namun gagal menjalani tahap transisi. Jadi proses demokratisasi merupakan sesuatu yang tidak mudah dan membutuhkan kesungguhan, konsistensi serta kesabaran yang memadai.

1. Deokrasi dan Partisipasi Politik

Bagian terpenting dalam demokrasi politik yang melibatkan partisipasi masyarakat luas adalah pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu merupakan indikator peradaban demokrasi suatu bangsa. Pada praktiknya, demokrasi membutuhkan prasyarat dasar yakni kedewasaan dalam berpolitik. Hal ini terkait erat dengan proses pembentukan kultur demokrasi yang harus terus diikhtiarkan, perlu kesabaran ekstra, mengingat issue semula merupakan resultan dari ragam gerak dan interaksi antar elemen bangsa yang dinamis dan terus berkembang.

Pemilu damai dan beradab merupakan ikhtiar wajib semua pihak. Cara pandang demikian meletakkan asumsi utama bahwa bukan masalah menang-kalah yang menjadi fokus kita sebagai bangsa, tetapi pembelajaran politik bagaimana nilai-nilai kebangsaan terimplementasikan secara kokoh dalam budaya politik yang berkarakter demokrasi.

Sehubungan dengan pertimbangan atas komitmen penyelenggara negara atas komitmen penyelenggara negara terhadap proses demokrasi, setidaknya ada dua sisi demokrasi, yaitu :

Pertama, komitmen negara terhadap demokrasi sebagai pengelolaan tatanan sosial

Kedua, komitmen negara memfasilitasi demokrasi sebagai laku partisipasi

Dalam perbincangan publik, demokrasi seringkali dimaknai berbenturan dengan pengelolaan tata sosial, hal ini sangat dimaklumi mengingat selama 32 tahun dibawah rezim orde baru, tatapan sosial selalu dimaknai sebagai pembungkaman saluran-saluran partisipasi politik atau adanya teror kekerasan negara terhadap mereka yang kritis.

Semestinya dengan pertimbangan bahwa demokrasi dan hal-hal substansinya didalamnya yakni kebebasan dan partisipasi adalah buah dari keberhasilan pengelolaan tata sosial dalam negara demokrasi. Jadi demokrasi bukan hanya diperdalam, demokrasi juga perlu dilindungi dari kekuatan-kekuatan diluar yang berusaha menghancurkan tatanan demokrasi.

Demokrasi sebagai pemenuhan hak-hak warga negara dan keterlibatan partisipatoris warga bukanlah imperatif abstrak, tetapi hidup dalam laku budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, selain pengawalan atas tata sosial, demokrasi hanya hidup dalam praktik kehidupan berkomunitas, yang ditandai hadirnya solidaritas sosial sebagai nafas hidupnya.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan eksploitasi fanatisme dan sikap anti demokrasi terutama dikalangan kelas menengah urban adalah kurangnya solidaritas bersama. Hal ini dapat ditemui dalam kehidupan sebagian kampus-kampus. Maraknya ketertarikan mahasiswa baru terhadap fenomena fanatisme beragama terjadi dalam suasana alienasi sosial ketika berkomunikasi yang terbuka dan lintas budaya tidak terjadi dan setiap orang berlindung dibalik identitasnya untuk dapat eksis secara sosial. Hal yang dapat dilakukan berupa kerja konkrit yang terkait dengan institusi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau lembaga terkait agar membangun narasi demokratik dan hadir dalam komunitas sosial dengan mengelaborasi kearifan dan pengetahuan berdialog bersama untuk menjaga ketahanan budaya berdemokrasi.

Formulasi New Deal untuk melawan krisis sosial melalui penguatan kebijakan struktural juga strategi kebudayaan berupa keterlibatan para budayawan, akademisi, tokoh masyarakat yang saling terkonsolidasi untuk merawat harapan dan menemukan kehidupan lebih baik (Nussabaum, 2013). Langkah-langkah kebijakan strategis yang terjadi di era reformasi tidak terlepas dari masalah relas kekuasaan yang menghambat capaian-capaian demokrasi.

Di Indonesia, krisis pengetahuan nilai-nilai demokrasi adalah hal krusial dan atmosfer yang mengurung Pilpres 2014 dan 2019, karena praktik demokrasi dilumuri kebencian sosial politik. Hilangnya kepercayaan akan prinsip demokrasi akan memudahkan jalan semua kekuatan politik yang memunculkan sentimen kebencian sosial dalam menggerakkan akumulasi dukungan politik. Negara-negara demokratis Indonesia sudah melewati tahap konsolidasi demokrasi. Secara konseptual bahwa masyarakat sipil yang kuat dan tingkat kemakmuran yang memadai akan membuat demokrasi aman. Selama beberapa dekade, perubahan politik di level nasional regional dan global tampaknya mendukung gagasan itu.

Dalam demokrasi politik, rekonsiliasi menjadi keniscayaan dalam konteks Pilpres 2019, ada dua hal penting dilakukan, pertama, penguatan terus menerus reformasi politik demokratis. Kedua, memperbaiki patologi politik dengan meruntuhkan zona kebencian. Bilakovics (2012) percaya bahwa demokrasi adalah prinsip paling menentukan pada zaman masa kini berdemokrasi dan berpartisipasi politik dalam mengatasi prasangka anti politik dan melaksanakan demokrasi yang kuat dan beradab.

1. Penutup
2. Indonesia memiliki prospek yang bagus dalam pemerintahan kehidupan, karena dewasa ini masyarakat memiliki pemikiran dan pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi di Indonesia cenderung mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal itu dapat menjadi acuan kehidupan dan sebagai pedoman dalam berkehidupan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan
3. Dengan banyak pembahasan dan kepentingan Indonesia bukan hanya sebagai ladang berpolitik dan berinvestasi semata. Namun lebih jauh, Indonesia merupakan tempat bersosialisasi dan memiliki banyak paham dan penyempurnaan demokrasi politik. Dengan adanya paradigma dan pelaksanaan demokratisasi dalam sistem demokrasi politik dan bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia
4. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi semakin terlihat jelas. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi dalam kehidupan politik antara lain memilih pimpinan negara dan juga berperan aktif untuk mempengaruhi pemerintah (*public policy*) sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

Agustino, L. 2017. Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Budiardjo, M. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lubis Mochtar. Demokrasi Klasik dan Modern. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mahfud, MD. 2010. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.

Samuel, H. 1983. Political Order in Changing Societies. New Heaven, Yeak University Press.

Soehino. 2009. Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta.

Sumarsono. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, H. 2005. Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.